

**Judul** : Senayan Restui Kerangka Makro 2019 - Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,6 Persen  
**Tanggal** : Rabu, 06 Juni 2018  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 13

## Senayan Restui Kerangka Makro 2019

# Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,6 Persen

**Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati kerangka ekonomi makro 2019. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan ditetapkan di kisaran 5,2-5,6 persen.**

KEMARIN, pemerintah dan Komisi XI DPR melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Hadir dalam rapat ini, dari perwakilan pemerintah antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut akhirnya menyepakati asumsi makro.

DPR dan Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,2-5,6 persen. Angka ini lebih rendah dari yang diajukan pemerintah yakni 5,4-5,8 persen. Angka itu sedikit lebih rendah dari yang diajukan pemerintah yakni 5,4-5,8 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, target pertumbuhan ekonomi yang

ditetapkan tersebut cukup baik karena mempertimbangkan sisi konsumsi.

"Kami sepakat asumsi pertumbuhan ekonomi 2019 mengikuti sasaran yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yakni 5,2 sampai 5,6 persen. Karena, konsumsi rumah tangga masih harus diperkuat di atas 5 persen," ungkap Ani-panggilan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Senayan.

Ani menuturkan, target semula yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4-5,8 persen sebenarnya masih cukup realistis. Meskipun, diakuinya capainya cenderung pada level target terendahnya.

Dia memastikan, penetapan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sudah mempertimbangkan perkembangan ekonomi tahun ini.

Ani mengungkapkan, pihaknya menargetkan 2019 bisa meningkatkan konsumsi masyarakat menengah dan atas. Hal itu ditetapkan karena kelompok ke bawah sudah mendapatkan banyak program dari pemerintah.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp 13.700-14.000, melemah dibandingkan target kurs tahun ini yang sebesar Rp 13.400. Sementara laju inflasi tahun depan tetap 3,5 plus minus 1 persen.

Sementara suku bunga SPN (surat pembendaharaan negara) 3 bulan, tahun 2019 di kisaran 4,6-5,2 persen, cenderung sama dengan tahun ini yang sebesar 5,2 persen. Kemudian, harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) ditargetkan sebesar 60-70 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang sebesar 48 dolar AS per barel.

Asumsi *lifting* minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sekitar 722-805 ribu

barel per hari, sementara *lifting* gas bumi sekitar 1,21-1,30 juta barel setara minyak per hari.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menyambut positif kesepakatan yang dicapai.

"Dengan demikian angka-angka tersebut untuk selanjutnya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai RAPBN 2019 dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.

### **Restui Subsidi Solar**

Sri Mulyani menyetujui tambahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk PT Pertamina (Persero) menjadi Rp 2.000 per liter.

"Kemarin keputusannya adalah kenaikan sebesar Rp 1.000 per liter menjadi Rp 2.000 per liter," ungkapnya.

Seperti diketahui, usulan penambahan subsidi merupakan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Usulan tambahan subsidi diajukan karena harga

minyak dunia terus meingkat. Selisihnya semakin jauh dari ICP yang ditetapkan sebesar 48 per barel dolar AS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, tambahan subsidi diperlukan agar bisa membantu kinerja keuangan Pertamina yang selama ini cukup tertekan dengan adanya kenaikan minyak mentah dunia.

"Itu akan cukup memadai dikombinasikan dengan langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN di mana Pertamina melalui beberapa blok produksinya bisa mendapatkan tambahan penerimaan," ungkapnya.

Ani mengungkapkan, selain subsidi BBM, pemerintah tengah berencana untuk menambah subsidi listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, diperkirakan akan ada tambahan pelanggan golongan subsidi 450 VA sebanyak 1 juta pelanggan. ■ KPJ